Attractive : Innovative Education Journal
Vol. 5 No. 2, July 2023

Menciptakan Organisasi yang Responsif: Memahami Birokrasi dan Memanfaatkan Keunggulannya dalam Manajemen

Agus Fatah Hidayat[1]
[1] *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia*

Corresponding Author: syariefsinau@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received
March 27, 2023
Revised
May 14, 2023
Accepted
May 20, 2023

ABSTRACT

This study examines the prevalent influence of Max Weber's bureaucratic principles on the administrative landscape of Indonesia. The fundamental tenets of bureaucratic implementation call for a convergence that places paramount importance on community service, irrespective of the beneficiaries. Bureaucracy, operating as a cornerstone of administrative function, is critically appraised in its efficacy in public service delivery. A fluid and dynamic interaction between bureaucratic entities and political figures is observed in the contemporary governmental milieu marked by a permeable demarcation between political and administrative spheres. This research endeavors to comprehensively comprehend the essence of bureaucracy while harnessing its inherent managerial strengths. Employing a qualitative methodology, this research engages in a thorough analysis of primary data sourced from an array of literature studies. The investigation yields positive and pragmatic implications, unraveling distinctive patterns of managerial excellence that wield consequential influence. The findings underscore the transformative potential of reformed bureaucracy as an instrument of change, offering a vantage point for bolstering management paradigms. The study culminates in a nuanced understanding of the bureaucratic domain, accentuating the optimization of managerial prowess.

Keywords: Administrative Function, Managerial Excellence, Management Optimization.

How to cite Agus Fatah Hidayat., (2023). Menciptakan Organisasi yang Responsif: Memahami Birokrasi dan Memanfaatkan Keunggulannya dalam Manajemen. *Attractive : Innovative Education Journal, 5(2)*. 659-671.
Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Published by CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Perkembangan di dunia birokrasi yang ada di Indonesia ini memang tidak bisa dipisahkan dari peran kolonialisme yang menjadi landasan di negeri tercinta ini. Sisi historis bagaimana negara Belanda pernah menduduki Indonesia dalam waktu yang cukup lama ini memberikan pengaruh yang besar pula di sisi pemerintahan dan juga birokrasi. Birokrasi yang mendapatkan pengaruh dari kolonialisme ini tentu saja mentransformasi sikap dan juga peran yang ditinggalkan oleh kerajaan nusantara yang pernah memimpin daerah-daerah di Indonesia. Dan transformasi tersebut tidak bisa dipisahkan dari latar belakang ekspansi politik yang sudah menjadi tren di benua biru pada kala itu. Penataan birokrasi tersebut tentu menjadi kebutuhan pokok pemerintah

kolonial mengenai administratif yang bisa menjadi salah satu pemicu dari stabilitas politik.

Birokrasi sendiri memiliki peran dan juga fungsi yang tidak bisa lepas dari sistem politik dimana perilaku birokrasi publik merupakan politik yang sudah diatur sedemikian rupa. Birorasi di era kolonial Belanda ini kerap dipakai sebagai cara untuk menjaga legitimasi di dalam wilayah pemerintahan Belanda pada kala itu. Penataan birokrasi dilakukan di awal kemerdekaan yang ternyata masih mendapatkan pengaruh dari birokrasi kolonial Belanda. Birokrasi di awal kemerdekaan tetap mementingkan mempertahankan legitimasi tersebut. Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1945 mengenai Peraturan tentang Komite Nasional di Daerah yang mengenai eksistensi pemerintah daerah dan juga hal yang bisa menjadi esensi keberadaan birokrasi yang akan jauh lebih detail dengan perubahan dan reformasi yang kerap terjadi di dunia birokrasi tersebut. Penataan birokrasi yang mendapatkan konfigurasi ini memiliki muatan bahwasanya setiap peraturan perundang-undangan bisa menjadi perwakilan semangat pemikiran dan juga suasana politik yang terjadi kala itu.

Politik dan juga birokrasi memiliki korelasi yang cukup dekat meski keduanya adalah institusi yang berbeda. Keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Menurut penuturan Goodnow bahwasanya keduanya mempunyai perbedaan dan juga pemisahan dengan paradigma dikotomi pada politik administrasi. Garis batas yang kabur disebabkan dengan pemerintahan modern di era globalisasi ini yang membuat perbedaan tersebut semakin kabur dan mempunyai koneksi yang jauh lebih dekat. Dengan kondisi tersebut demarkasi diantara perumus dan juga pelaksana kebijakan dan juga relasi yang dibangun diantara administrasi dan juga politik yang bisa menjadi lebih dinamis justru mulai hilang. Kemudian akan terbentuk fungsi birokrasi yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di arena panggung politik. Berdasarkan pemiiran dari Heywood (2013) bahwa ada 4 fungsi yang biasa muncul di bidang birokrasi yang memiliki relasi dengan dunia politik yang terdiri dari: Fungsi administratif, fungsi artikulasi dari kepentingan publik, fungsi dari stabilitas politik dan fungsi sebagai penasihat kebijakan di bidang politik.

Fungsi di sektor penasihat kebijakan ini birokrasi menjadi fungsi yang sangat penting dan kerap terabaikan di dalam proses kebijakan tersebut. Birokrasi seharusnya mempunyai peran yang cukup penting sebagai mediator diantara 2 buah kelompok atau lebih yang memiliki kepentingan dan juga pejabat politik yang ada di dalam perumusan kebijakan publik. Di dalam birokrasi tersebut ada akumulasi pengetahuan internal dan juga isu yang berhubungan dengan kebijakan yang memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan publik yang jauh lebih baik. Tentu hal ini membuat asumsi bahwasanya pembuatan kebijakan yang lebih berpihak kepada kapasitas administratif yang kuat.

Sementara di sektor desain kebijakan sendiri yang memiliki kemampuan di dalam merumuskan dasar pemikiran kebijakan yang memiliki ekspektasi dan konsistensi demi mencapai tujuan yang baik dan optimal merupakan pembuat kebijakan yang ideal. Ada 4 tantangan yang memberikan penharuh kepada pembuatan kebijakan yang ideal yang terdiri dari desain yang terbentuk dari bukti ilmiah dan juga pengalaman masa lampa dengan latar belakang yang normatif. Konsistensi internal dari alasan-alasan kebijakan yang dibuat. Konsistensi eksternal dengan dasar analisa konteks dan juga isu kelayakan politik serta lintas sektoral. Kebijakan yang sesuai dengan sumber daya yang ada.

Peran birokrasi lebih dekat dengan proses kebijakan ini yaitu nasihat dari sektor birokrasi dengan pengaruh dari pengalaman dan juga analisa mengenai kebutuhan

dibandingkan respon yang berlebih kepada tuntutan publik yang biasanya terjadi kepada politisi menurut Bozeman (1982). Sementara menurut West (2005) bahwasanya keunggulan birokrasi dan juga nasihat mengenai kebijakan ini bisa terbangun dengan citra kompetensi yang netral dengan bertumpu pada penerapan obyektifitas dan juga analisa dari keahlian.

Peran dari birokrasi yang menjadi penasihat kebijakan ini memang sudah seharusnya menjadi reaksi dan juga respons yang terjadi terhadap adanya tuntutan yang dirumuskan oleh masyarakat. Birokrasi mempunyai atribut yang memberikan kemandirian yang berasal dari unsur politik dan juga tekanan sosial yang bertindak dengan landasan analisa dari keahlian dengan jangka panjang di lingkungan masyarakat. Nasihat yang diberikan oleh birokrasi ini tentu harus dikembangkan dengan analisa yang komplit bukan hanya tuntunan yang berasal dari dunia politik dan juga kelompok sosial. Kemandirian di sektor birokrasi ini sudah seharusnya bekerja dengan perspektif jangka panjang. Hal ini memang disebabkan bahwa birokrasi didesain untuk jangka panjang. Guna melakukan proses informasi birokrasi yang cenderung berhati-hati dan tidak terlalu responsif dengan lebih mengedepankan analisa dari pengalaman administratif, tentu harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Menurut pemikiran Heywood (2013) bahwa birokrasi memiliki fungsi birokrasi yang memiliki akar kepada paradigma tentang politik birokrasi yang mempunyai pandangan bahwasanya kajian mengenai politik birkrasi tersebut merupakan sudut pandang yang menyajikan bagaimana peran dari birokrasi dan juga di sisi adminisrasi di dalam pembuatan kebijakan untuk publik yang juga menolak pandangan dikotomi mengenai adminisitrasi dan juga politik.

Politik birokrasi sendiri berdasarkan pandangan dari Daniarsyah (2015) bahwasanya dibentuk dengan 4 pondasi kunci yang terdiri dari:

1. Pemerintah yang bertindak sebagai badan eksekutif ini memiliki sejumlah organisasi dan juga individu yang divergen dengan tujuan dan juga agenda tersendiri.
2. Tidak adanya aktor pemerintah yang memiliki dominasi dan juga bertindak sendiri atau unilateral
3. Keputusan final dalam birokrasi ini merupakan hasil dari produk dan atau hasil bargaining kompromi yang terbentuk dari proses politikal
4. Ada perbedaan-perbedaan diantara pembuat kebijakan dan juga pelaksanaan serta penerima keputusan

Paradigma di sisi politis birokrasi ini menyatakan bahwasanya tindakan pemerintah adalah hasil dari tawar-menawar serta kompromi diantara berbagai macam elemen organisasi yang ada di dalam pemerintahan. Birokrasi merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam sistem pemerintahan dimana merupakan sebagai elemen yang memiliki posisi di ranah politik dan juga mempunyai atribut tentang kekuasaan yang lengkap. Menurut Guy Peters (2001) ada sektar 6 sumber kekuasaan yang sangat penting di dunia birokrasi yang terdiri dari personifikasi negara, penguasaan informasi dan juga keahlian, pengambilan keputusan, dukungan politik, status sosial, dan kelembangan stabil dan permanen.

Isu prosedural di dalma organisasi yang mengemukakan pendapat bahwasanya ada 2 dimensi di dunia organisasi yang bisa menjadi kunci sudah mulai ditinggalkan. Teori politk birokrasi sendiri mempunyai definisi sebagai korelasi diantara perilaku dan juga struktur lembaga organisasi serta distribusi kekuasaan yang memiliki hubungan.

Aspek politis birokrasi sendiri bisa dielaborasi di dalma paparan yang menyajikan ada 4 fungsi yang sudah menjadi ciri khas dari birokrasi:

1. Administrasi

   Fungsi ini adalah fungsi inti di dalam dunia birokrasi. Fungsi tersebut guna melaksanakan kebijakan dan juga hukum birokrasi yang siap melakukan tugas dari pemerintahan. Birokrasi mendapatkan istilah sebagai administrator dimana pemerintah disebut sebagai eksekutif politik. Perbedaan ini memberikan sajian bahwasanya perbedaan substantif yang ada di dalam peran para politisi yang menjadi pembuat kebijakan dan juga peran dari birokrat yang menjadi implementor dari kebijakan tersebut. Aparatur negara juga terlibat secara langsung dan eksklusif di dalam pertanggung jawaban administratif yang akan melaksanakan program kesejahteraan dan juga jaminan sosial serta regulasi ekonomi hingga pemberian izin. Begitu pula dengan penyediaan informasi kepada masyarakat.

2. Artikulasi Kepentingan

   Fungsi ini menjadi salah satu fungsi dari birokrasi di dalam mengartikulasikan kepentingan. Hal ini disebabkan bahwa birokrasi memiliki korelasi denagn kelompok kepentingan via tugas pelaksanaan dari kebijakan serta keterlibatan mereka di dalam perumusan kebijakan dan nasehatnya untuk masyarakat. Tentu saja aspek tersebut disebabkan adanya kecenderungan korporatis yang mampu mengaburkan dari sisi perpecahan diantara kepentingan dari badan pemerintah dan organisasi. Konsep yang disebut clientelism ini memberikan keuntungan pada sistem politik yang manfaatnya bisa digunakan untuk memelihara konsensus.

3. Stabilitas politik

   Fungsi dari birokrasi ini bisa menyajikan stabilitas di dalam dunia politik. Hal ini sangat penting di dalam negara berkembang. Birokrasi yang ada di negara-negara berkembang ini diperlukan keberadaan terutama dengan profesional yang bisa menyajikan jaminan bahwasanya pemerintahan bisa dilakukan dengan cara yang memuaskan. Stabilitas ini memiliki ketergantungan terhadap status birokrasi dan birokrat yang menjadi aparatur yang profesional dan permanen. Akan tetapi sifat tersebut mempunyai kelemahan. Pasalnya tanpa adanya pengawasan dan akuntabilitas publik yang efektif, maka birokrasi akan memiliki kecenderungan bersifat oligarki yang bisa memunculkan kasus korupsi yang sangat besar. Terutama di negara berkembang. Di situasi konservatif, birokrasi akan lebih mengedepankan pelayanan kepada umum dibandingkan politisi yang terpilih. Dan hal ini membuat birokrasi mempunyai pembenaran di dalam melawan politik yang reformis atau radikal.

4. Penasihat Kebijakan

   Signifikansi politik birokrasi berasal dari peran sumber utama informasi kebijakan dan juga nasihat yang tersedia untuk pemerintah. Peran dari kebijakan ini bisa membantu status dari aparatur negara tersebut. Perbedaan ini terdiri dari tanggung jawab dari birokrat yang diemban tersebut. Sementara kebijakan sendiri seharusnya berasal dari politisi dim ana birokrat hanya menyajikan nasihat. Peran kebijakan dari birokrasi tersebut memiliki muara dari 2 fungsi yang terdiri dari penguraian pilihan kebijakan bagi para pejabat politik dan juga meninjau naskah kebijakan di dalam kaitannya dengan dampak serta konsekuensi yang bisa timbul.

   Ada beberapa alasan bahwasanya peran kebijakan birokrasi yang jauh lebih signifikan terhadap dunia politik. Seperti ada perbedaan yang cukup jelas dan transparan mengenai pembuat kebijakan dan juga pemberi nasihat tentang

kebijakan. Keputusan akan dibuat dengan dasar informasi yang tersedia dan memiliki konten kebijakan yang terstruktur oleh nasihat yang ditawarkan tersebut. Ada sumber yang sangat penting dari nasihat untuk para birokrat dan juga politisi dimana keahlian serta pengetahuan khusus yang terakumulasi di dalam birokrasi tersebut. Tanggung jawab pemerintah mempunyai konsekuensi yang luas dan kebijakan menjadi lebih kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang merujuk kepada interaktif koleksi data dan juga pengumpulan data yang diambil dari proses studi pustaka. Penyajian data yang dilakukan menggunakan data primer dan juga data-data sekunder sebagai salah satu data penting untuk dimasukkan ke dalam penelitian ini. Data-data tersebut akan memberikan kesimpulan yang bisa dilakukan secara berulang dengan tergantung kepada proses dan kompleksitas permasalahan yang terjadi.



Gambar 1. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen birokrasi yang profesional tentu saja harus mempunyai strategi yang jitu di dalam pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan adanya karakteristik dari birokrasi yang profesional diantaranya adalah:

1. Perubahan yang besar terhadap orientasi administrasi negara tradisional yang bisa menjadi perhatian besar terhadap pencapaian dari hasil serta tanggung jawab pribadi dari pemimpin birokrasi.
2. Keinginan yang muncul dari birokrasi klasik yang bisa menjadikan organisasi hingga aparatur negara serta pengabdian yang jauh lebih fleksibel. Selain itu kondisi pekerjaan di birokrasi juga bisa menjadi lebih luwes dan tidak kaku kala menyajikan pelayanan kepada masyarakat

3. Tujuan dari organisasi dan juga individu pegawai bisa disusun dengan jelas yang memberikan kemungkinan menjadi tolok ukur prestasi melalui indikator kinerja masing-masing. Begitu pula dengan sistem evaluasi program tersebut.
4. Staf pemimpin senior bisa memberikan komitmen politik yag jelas terhadap pemerintahan yang ada. Dan hal ini bisa memberikan sikap yang netral dan non partisan.
5. Fungsi dari pemerintah bisa dilihat dari uji pasar yang melalui pihak ketiga tanpa ditangani sendiri oleh pemerintah dan tidak disediakan dari pemerintah setempat
6. Mengurai peran dari pemerintah melalui kegiatan privatisasi tersebut.
7. Birokrasi yang ada di dalam pemerintahan harus bersifat netral dan juga steril dari unsur politik dan juga akomodasi politik yang bisa memberikan hambatan kepada efektifitas pemerintahan.
8. Rekruitmen dan juga penempatan pejabat birokrasi harus bebas dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme.

Penerapan akan pendekatan manajemen profesional di lingkungan publik memang sudah banyak disebutkan oleh para ahli dan juga akademisi dengan berbagai macam label yang melekat di dalamnya. Seperti ungkaan dari Pollitt (1990) yang menyebutkan nama managerialism. Lalu Hood yang menyebutkan mengenai new public management terhadap birokrasi pemerintahan. Semua label yang disematkan dan juga disebutkan tersebut tentu saja memiliki pendekatan di dunia manajemen profesional yang bisa merubah dan mengatur permasalahan orientasi fokus dan juga fungsi serta peran dari birokrasi pemerintahan yang lebih mengedepankan sisi proses ke arah produk dan juga dari peraturan dari pemerintah ke arah tujuan dari pemerintahan.

Perbedaan di sisi teoritis mengenai rule governance dan juga goal governance ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Di sisi kelemahan di bidang rule governance, teradpat penerapan peraturan yang sangat kaku dan juga strict. Selain itu ada ciri struktural hierarki dan juga pengawasan yang cukup ketat. Selain itu sifat impersonal yang mampu memberikan peran dari birokrasi menjadi mesin yang rasional guna menciptakan tingkah laku atau perilaku yang formal dan kaku terhadap aparat yang dianggap kurang memiliki kepekaan terhadap nilai kemanusiaan dan lingkungan sosial. Praktis hal tersebut bisa memberikan struktur birokrasi yang terlalu rasional hingga bisa menimbulkan hal yang sifatnya disfungsional serta tidak terlalu efisien dengan adanya konflik kepada masyarakat yang menjadi aktor utama dalam pelayanan birokrasi tersebut. Begitu pula dengan peraturan atau regulasi yang sebenarnya menjadi sarana guna mencapai kepuasan dan tujuan dari birokrasi tersebut. Sementara untuk kelebihan dari faktor ini adalah dengan tinggi dan tertibnya administrasi yang bisa dicapai dan juga menjadi tujuan dari birokrasi publik.

Sistem rule governance ini bisa digunakan untuk organisasi. Hanya saja faktor yang bisa menjadi keunggulan dari sistem ini adalah tertib administrasi yang bisa memberikan keuntungan dan kemudahan bagi organisasi itu sendiri. Dengan tertib administrasi yang cukup disiplin dan tinggi, tentu bisa membuat organisasi tertata dengan rapi dan juga memiliki manajemen yang stabil. Sedangkan untuk pemahaman dari sistem goal governance ini bahwasanya mempunyai keunggulan di sisi fokus utama yangt ereltak terhadap target hasil dan juga responsibiliti yang dilakukan individu-individu yang memiliki target dan tujuan mereka. Keunggulan dari sistem ini tentu saja selalu berseberangan dengan kelemahan yang dimiliki. Kelemahan tersebut

akan muncul jika prinsip dari manajemen baru ini diterapkan dan juga dilakukan kepada kebijakan di sektor publik.

Salah satu sistem pemerintahan dan juga konsep birokrasi yang masih menjadi diskursus adalah konsep dari Gaebler dan Osborn. Kedua peneliti ini menyajikan nilai baru di dalam birokrasi dan juga pemerintahan yang dianggap memiliki kekuatan sekaligus kelemahan yang cukup signifikan. Konsep ini memang lebih banyak mengedepankan goal governance dengan menyisihkan sisi administrasi konvensional atau klasik yang kerap digunakan di dalam sistem rule governance dan juga masih kerap digunakan. Konsep tersebut memang disebabkan pemerintahan yang berada dalam keadaan tertinggal dari dunia-dunia atau unsur globalisasi yang terus maju. Konsep ini menghapus nilai pemerintahan klasik atau konvensional terhadap konsep yang diusung oleh Gaebler dan juga Osborn tersebut. Sementara Pollit menyatakan bahwasanya penerapan prinsip dari konsep tersebut tidak bisa sepenuhnya bisa berjalan dengan baik untuk unsur publik. Ada 2 aspek yang bisa melemahkan konsep tersebut yang menyatakan bahwa di dalam pelayanan publik tersebut memiliki kecenderungan berada di dalam sebuah hal yang khusus dan juga kompleks dibandingkan dengan pelanggan di pasar normal pada pelayanan publik tersebut. Selain itu para pengguna jasa layanan publik ini tidak hanya dari konsumen semata. Namun ada dari warga negara lainnya yang juag menjadi bagian dari implikasi pelayanan publik tersebut.

Melakukan reposisi tentu harus dilakukan menurut penuturan dari Hughes (1994) bahwasanya ada penyusunan agenda mengenai kebijakan reformasi pada administrasi negara yang bisa bersinergi terhadap kedua konsep tersebut yaitu goal dan rule governance. Model profesionalisme ini memiliki sisi baik dengan menyajikan sikap yang adil dan juga etika tinggi serta kondisi korusi yang bisa dicegah serta dipantau dengan bentuk dasar dari manajemen yang dianut oleh pemerintah. Di dalam organisasi sendiri terutama manajemen, kedua konsep tersebut bisa dipadu padankan tanpa menghilangkan salah satu konsep agar bisa terbentuk pelayanan dan juga mencontoh sisi birokrasi demi menciptakan organisasi yang responsif dan juga maju. Sementara perdebatan mengenai tatanan pelayanan dan juga konflik di dalam tatanan tersebut kerap dibandingkan oleh para ahli dan akademisi dari sosiologi serta politik. Korelasi diantara struktur dan tindakan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian. Korelasi dan relevansi diantara struktur dan juga tindakan memang kerap digambarkan memiliki sifat antagonis yang kerap memberikan pandangan yang buruk Struktur kerap ditampilkan sebagai sebuah ketentuan dan juga kekuatan penghambat serta kestabilan. Sementara tindakan ini cenderung menyajikan daya cipta serta otonomi hingga ketidak stabilan di dalam dunia pelayanan publik. Dan di Indonesia sendiri birokrasi sudah menjadi lahan dan ladang untuk mengambil keuntungan dari pelayanan publik dan masyarakat.

Oleh sebab itu reformasi dilakukan demi merubah tatanan dari sistem ketatanegaraan yang juga sesuai dengan UUD 1945. Perubahan yang dilakukan ini memiliki kaitan dengan struktur dan juga mekanisme dari lembaga tinggi negara yang akan menciptakan keseimbangan dan membatasi kekuasaan terhadap presiden. Reformasi nasional yang ditujuan sebagai mengatasi krisis multidimensional ini membuat bangsa Indonesia kehilangan 3 aspek penting dari jatidiri bangsa seperti:

1. Jati diri bangsa yang hilang
2. Martabat dan kehormatan yang menurun
3. Kehormatan bangsa yang runtuh

Reformasi birokrasi pemerintahan harus dilakukan secara total dan gradual. Agar bisa memberikan keuntungan dan juga bisa menjadi patokan sebagai penciptakan

organisasi yang responsif terhadap pelayanan publik. Perubahan dan reformasi ini harus berkesinambangan terhadap penguatan nilai dan juga fundamental sebuah bangsa di dalam pelayanan publik dan juga perubahan paradigma terhadap administrasi publik tersebut.

Perubahan sistem pemerintahan ini berdasarkan nilai, partisipasi dan juga responsibiliti hingga desentralisasi yang sesuai dengan nilai dari fundamental sebuah bangsa. Kondisi obyektif bangsa dan juga birorasi pemerintahan ini ditandai dengan beberapa faktor yang terdiri dari indesk Korupsi yang cukup besar, enduduk miskin yang masih cukup besar, pengangguran yang meningkat, investasi yang rendah di Indonesia, target dari PP mengenai MDG yang tidak tercapai.

Sementara kondisi obyektif sebuah bangsa terutama Indonesia yang berasal dari pendekatan birokrasi pemerintahan sendiri ditandai dengan faktor diantaranya:

1. Organisasi pemerintahan yang cukup banyak dengan perbandingan lembaga pusat dan daerah yang tidak berimbang yang membuat adanya tumpang tindih diantara organisasi-organisasi tersebut.
2. SDM dari aparatur negara yang terus berkembang dan tidak merata penyebaran dan juga kualitas dari pelayanan mereka
3. Tata laksana dari Kementrian dan organisasi atau lembaga negara yang tidak memiliki SOP di dalam pelayanan publik tersebut. Sehingga tidak adanya tugas dan fungsi kebijakan dan pelayanan publik
4. Tidak adanya disiplin dan juga etos kerja serta etika pemerintahan yang dianut oleh para aparatur negara.

Reformasi yang dilakukan terhadap birokrasi pemerintahan ini yaitu membangun kepercayaan kepada publik dan juga mulai mencoba untuk menghilangkan citra buruk atau negatif kepada aparatur negara. Selain itu diharapkan bisa mengedepankan manajemen pemerintahan sebagai manajemen kepercayaan publik. Visi dari reformasi terhadap birokrasi ini tentu saja memiliki target sebagai perwujudan pemerintahan yang profesional dan juga memiliki integritas yang tinggi hingga mampu menjadi penyelenggara pelayanan prima terhadap masyarakat yang bisa menjalankan manajemen pemerintahan yang demokratis agar bisa menjadi tata pemerintahan yang bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Reformasi birokrasi ini tentu diharapkan bisa membentuk birokrasi yang baik dan bisa menjadi contoh untuk menciptakan organisasi yang responsif agar memberikan pelayanan yang memuaskan dan menghilangkan citra negatif terhadap birokrasi pemerintah. sasaran dari reformasi tersebut tentu saja digunakan untuk mewujudkan beberapa aspek dan juga faktor yang terdiri dari menciptakan birokrasi yang responsif, menciptakan birokrasi bersih dan transparan, menciptakan birokrasi yang efisien, menciptakan birokrasi yang efektif, dan menciptakan birokrasi yang terdesentralisasi.

Demi pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola yang baik dan dinamis serta integratif, tentu harus mewujudkan birokrasi yang bersih dan juga transparan sebagai salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara. Demi mewjudkan hal tersebut, arah kebijakan dan juga strategi pembangunan ini bisa memprioritaskan terhadap beberapa bidang yang bisa memberikan peran yang jauh lebih maksimal. Di dalam memulihkan kepercayaan kepada publik dan membangun organisasi yang responsif dan unggul, tentu saja birokrasi di dalam pemerintahan bisa menjadi perwujudan tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan. Oleh sebab itu harus diperkuat dengan strategi dalam mencegah terjadinya korupsi dan juga menutup peluang agar hal tersebut tidak lagi terjadi di kemudian hari. Kebijakan-kebijakan nasional yang mengatur mengenai integritas tentu harus dilaksanakan dengan efektif

dan juga bisa membangun karakter aparatur negara yang bersih dengan kode etik dan perilaku yang bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Reformasi birokrasi sendiri memang tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Ada berbagai macam rintangan dan juga tantangan yang dihadapi. Tentu saja harus ada strategi khusus yang pas dan tepat guna membangkitkan dan mensukseskan proses dari reformasi birokrasi. Dan tentu saja guna mewujudkan pemerintahan yang efektif di dalam pemerintahan pusat dan juga daerah. Guna melakukan pelaksanaan reformasi tersebut, tentu ada beberapa langkah strategi yang bisa menjadi jalan yang cukup maksimal.

Strategi komprehensif menjadi salah satu strategi yang memiliki pola dimana kerap dignakan pada lembaga manajerial pusat di dalam proses pengendalian dari berbagai macam bidang cakupan. Di dalam strategi tersebut penerapannya membutuhkan dukungan politik dari para penguasa sementara lembaga legislatif dan juga partai-partai politik yang kurang mendapatkan dukungan yang memadai. Politik yang berkomitmen ini tentu saja dibutuhkan di dalam proses reformasi tersebut. Perencanaan reformasi administrasi bisa dilakukan untuk dibuat agar bisa memiliki tujuan di dalam proses reformasi birokrasi serta komitmen hingga pendekatan di dalam dunia politik pemerintahan. Strategi ini mempunyai kelebihan dimana perubahan yang terjadi bisa muncul secara menyeluruh dan juga memerlukan waktu yang relatif jauh lebih singkat. Akan tetapi kelemahan dari strategi ini adalah bahwasanya strategi tersebut memerlukan perhatian yang jauh lebih banyak dari semua sisi.

Strategi kedua adalah strategi incremental yang merupakan pendekatan secara bertahap dan juga menjadi rantai yang memiliki urutan. Reformasi dianggap sebagai sebuah proses. Pendekatan tersebut bisa mengutamakan pelatihan. Akan tetapi strategi ini memiliki proses yang cukup lama dimana pendekatan ini memiliki sifat yang gradual atau bertahap. Akan tetapi strategi tersebut bisa membangun kepercayaan di semua aspek yang bisa membantu perwujudan strategi reformasi tersebut.

Menurut Dror bahwasanya ada beberapa kluster strategi yang memiliki peran jauh lebih konkret terhadap persoalan reformasi administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan. Strategi tersebut tentu memiliki sangkut paut terhadap SDM yang berkualitas dan juga pengaruh kekuasaan politik yang tinggi terhadap birokrasi dan juga perubahan sistem yang mendasar. Ada beberapa strategi reformasi administrasi yang terdiri dari:

1. Mampu melakukan penyederhanaan prosedur seghingga akan jauh lebih responsif dan juga mengurangi duplikasi proses dengan pendekatan yang jauh lebih cepat dan juga hemat
2. Praktik yang dianggap bisa membuat prosedur dan reformasi administrasi melemah akan dikurangi dan juga dicegah sejak dini
3. Menghasilkan komponen utama dan juga kondisi yang ideal di dalam dunia birokrasi dan juga organisasi sehingga akan jauh lebih responsif dan transparan
4. Penyesuaian sistem administrasi yang bisa dilakukan sebagai cara mengantisipasi efek perubahan sosial
5. Sistem administrasi dan politik harus terbagi dengan jelas dan juga terurai agar bisa berjalan dengan sendiri-sendiri tanpa adanya campur tangan birokrat atau politikus
6. Korelasi dan relevansi diantara sistem administrasi dan juga masyarakat bisa terjadi sehingga jauh lebih demokratis

Menurut pandangan dari Sarundajang bahwasanya di dalam perspektif birokrasi dan organisasi yang berhubungan dengan pelayanan dan juga peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah, tentu dibutuhkan strategi reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya di dalam peningkatan kualitas dari pelayanan publik serta mencegah korupsi hingga peningkatan kinerja dari aparatur pemerintahan. Dengan strategi ini, tentu bisa menciptakan birokrasi dan organisasi yang responsif.

KESIMPULAN

Di dalam menciptakan organisasi yang responsif dan memaksimalkan keunggulan birokrasi di dunia manajemen serta pemerintahan ini tentu harus memiliki strategi dan juga reformasi atau perubahan di dalam dunia birokrasi sehingga terbentuk konsep birokrasi yang bersih, transparan dan juga memiliki kesan positif terhadap pelayanan masyarakat. Dengan organisasi dan birokrasi yang responsif, tentu saja bisa memberikan kepuasan tersendiri di kalangan masyarakat dan juga memberikan dampak yang jauh lebih signifikan di dunia birokrasi pemerintahan itu sendiri. Dengan melakukan organisasi yang responsif, reformasi birokrasi menjadi nilai keharusan di dunia organisasi dan manajemen pemerintahan.

REFERENCES

Aberbach, J. D. (2003). Introduction: Administration in an era of change. In *Governance* (Vol. 16, Issue 3). DOI:10.1111/1468-0491.00218

Alamsyah. (2003). Politik Dan Birokrasi: Reposisi Peran Birokrasi Publik Dalam Proses Politik Lokal. *Jurnal Administrasi Publik Unpar*, *2*(1), 55–70. https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/issue/view/122

Asmawi Rewansyah, 2010, Reformasi Birokrasi Dalam Good Governance, PT.Yusaintanas Prima, Jakarta https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=2166

Aubin, D., Brans, M., & Fobé, E. (2017). Policy analysis in the central and regional governments. In *Policy Analysis in Belgium*. (2) DOI:10.2307/j.ctt1t89chs.12

B. Guy Peters. (2001). The Politics of Bureaucracy, Fifth edition. *Routledge*, *43*(2). https://doi.org/10.4324/9780203455494

Baert, Patrick, 1998, Social Theory Twentieth Century, Cambridge : Polity Press. https://doi.org/10.1177/00016993990420010

Barzeley, 1992, Breaking Through Bureaucracy: A New Vision For Managing in Government, University California Press, Berkeley Los Angeles- Exford. https://doi.org/10.2307/3325101

Bevir, Mark, 2011, "Democratic Governance: A Genealogy", Local Government Studies, Vol. 37(1), February 2011, (pp 3– 17) https://doi.org/10.1080/03003930.2011.539860

Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall.W, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Terjemahan, Jakarta : Prestasi Pustakaraya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=513648

Bozeman, B., Aberbach, J., Putnam, R., & Rockman, B. (1982). Bureaucrats and Politicians in Western Democracies. *Journal of Policy Analysis and Management*, *1*(4). DOI:10.2307/j.ctvjz82fv

Boaz, David. 1997. Libertarianism: A Primer. New York: Free Press
https://doi.org/10.1023/A:1009085531949

Budiono, Priyo, Santosa. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: PT Rajawali Press
https://onesearch.id/Record/IOS3731.JAKPU000000000000932

Chisholm, M., 2010, "Emerging Realities Of Local Government Reorganisation", Pub- lic Money Management, 30, (pp. 143– 150)
https://doi.org/10.1080/09540960903513847

Daniarsyah, D. (2015). Bureaucratic Political And Neutrality Of Bureaucracy In Indonesia. *Jipsi Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, *V* (2).
https://onesearch.id/Record/IOS4207.30955/Description

David Osborne dan Peter Plastrik, 1996, Banishing Bureaucracy: The Five Strategies For Reinventing Government, Addison Wesley, Publishing, Company Ltd, California, New York
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=207658

Denhardt, JV dan RB Denhardt, 2000, The New Public Service Rather Than Steering Public Administration Review, Nov/Des,60,6, 549-559.
DOI:10.1111/0033-3352.00117

Èric, M. (2011). Between detachment and responsiveness: Civil servants in Europe and North America. *West European Politics*, *34*(6).
DOI:10.1080/01402382.2011.616663

Ermaya Suradinata, 2004, Management of Change and Strategies: Creative Leadership, National Reliance Institute Republic of Indonesia, Lemhanas
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=422176

Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2018). The public administration theory primer, third edition. In *The Public Administration Theory Primer, Third Edition*.
https://doi.org/10.4324/9780429494369

Giddens, Anthony, 1995, The Constitution of Society, Cambridge : Polity Press.
https://doi.org/10.1177/144078338602200128

Goodnow, F. (2003). Politics and administration: A study in government. *Russell The Journal Of The Bertrand Russell Archives*, *19*.
https://doi.org/10.4324/9781351308281

Hariandja Denny, BC, 1999, Birokrasi Nan Pongah: Belajar dari Kegagalan Orde Baru, Yogyakarta: Kanisius.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=618008

Heckscher, Charles and Donnellon, Anne (ed), 1994, The Post Bureaucratic Organi- zation: New Perspectives on Organi- zational Change, London, New Delhi : Sage Publications.
https://www.academia.edu/50554432/The_post_bureaucratic_organization_New_perspectives_on_organizational_change

Henderson, Keith M, and Dwivedi,O.P, 1999, Bureaucracy and The Alternatives in World Perspective, London : Macmilland Press Ltd.
https://link.springer.com/book/10.1057/9780333983355

James Perry dan Annie Hondeghem,2008, Motivation in Public Management, Oxport University Press, New York
https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=647

Mavanyisi, H. J. (2002). *The nature of political control over the bureaucracy with preference to the Northern Province*. *November*. (2) (3) (4) (5) (6)

http://hdl.handle.net/10500/696

Maswardi, et all, 2004, Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan, Samitra Media Utama, Jakarta
https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=32614

Miftah Thoha, 1987, Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi- Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II, Rajawali Press Jakarta
https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6881

Muhammad, Ismail, dkk, 2004, Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAN RI, Jakarta
https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=cari&kata=Tim%20Studi%20Pengembangan%20Sistem%20Akuntabilitas%20Kinerja%20Instansi%20Pemerintah%20BPKP%20[penj.]

Osborn, David and Gaebler, Ted, 1996, Mewirausahakan Birokrasi: Reinvent- ing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor publik, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
https://onesearch.id/Record/IOS3765.SULSE000000000064635

Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Jakarta : PPM.
https://onesearch.id/Record/IOS3107.24805

Patricia W Ingraham, 1994, New Paradigm For Management: Issues For Changing Public Service, Yossey-Bass Inc Published, San Francisco, California.
https://doi.org/10.2307/3380850

Putra, Fadillah dan Arif, Saiful, 2001, Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinven- ting Government Osborne Gaebler, Yogyakarta : LKiS.
https://onesearch.id/Record/IOS2847.INLIS000000000057901

Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. *Zeitschrift Fur Personalforschung*, *28*(4), 485–487.
https://doi.org/10.1177/23970022140280040

Santoso, Priyo Budi, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
https://onesearch.id/Record/IOS2891.YOGYA000000000000530

Setiono, Budi, 2002, Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi, Bekasi : Gugus Press.
https://onesearch.id/Record/IOS6527.slims-8539?widget=1

Siagian, SP, 1994, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi Dan Terapinya, Jakarta : Ghalia Indonesia.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=254119

Sumoprawiro, Hariyoso,2002, Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta : Peradaban.
https://onesearch.id/Record/IOS3553.slims-499

Tjahya Supriatna, 1996, Administrasi, Birokrasi dan Pelayanan Publik, Nimas Multima, Bandung

Tjokrowinoto, Moeljarto,2001, Birokrasi dalam Polemik, Saiful Arif (editor), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=126944

Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta : Balai Pustaka.
https://catalogue.nla.gov.au/catalog/1719647

West, W. F. (2005). Neutral competence and political responsiveness: An uneasy relationship. *Policy Studies Journal*, *33*(2). DOI:10.1111/j.1541-0072.2005.00099.x

Copyright Holder :
© Agus Fatah Hidayat., (2023).

First Publication Right :
© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

